



# Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat dan Daerah T.A. 2019

Belitung, 6 November 2018



**Direktur Otonomi Daerah**  
Kementerian PPN/Bappenas



# Outline

- 1 Arah Kebijakan RKP 2019
- 2 Isu Strategis  
Pengembangan SDM  
Aparatur
- 3 Proyek Prioritas BPSPDM  
Kemendagri Pada RKP 2019



# 1

## Arah Kebijakan RKP 2019

# Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan

## KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



1. Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui pendekatan **Money Follow Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif**, dan **Spasial** dengan memperhatikan pada:



Perkuatan  
**Perencanaan dan  
Penganggaran**



**Pengendalian  
Perencanaan**



**berbasis  
Kewilayahan**

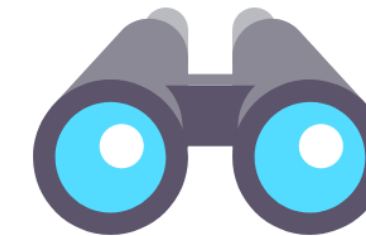


Integrasi **Sumber  
Pendanaan**

## PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



**Tematik:** fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas



**Holistik:** pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)



**Integratif:** integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan



**Spasial:** Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi

# Integrasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan

## Lingkup Pemerintah Pusat



### APBN

- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Hibah
- Urusan Bersama



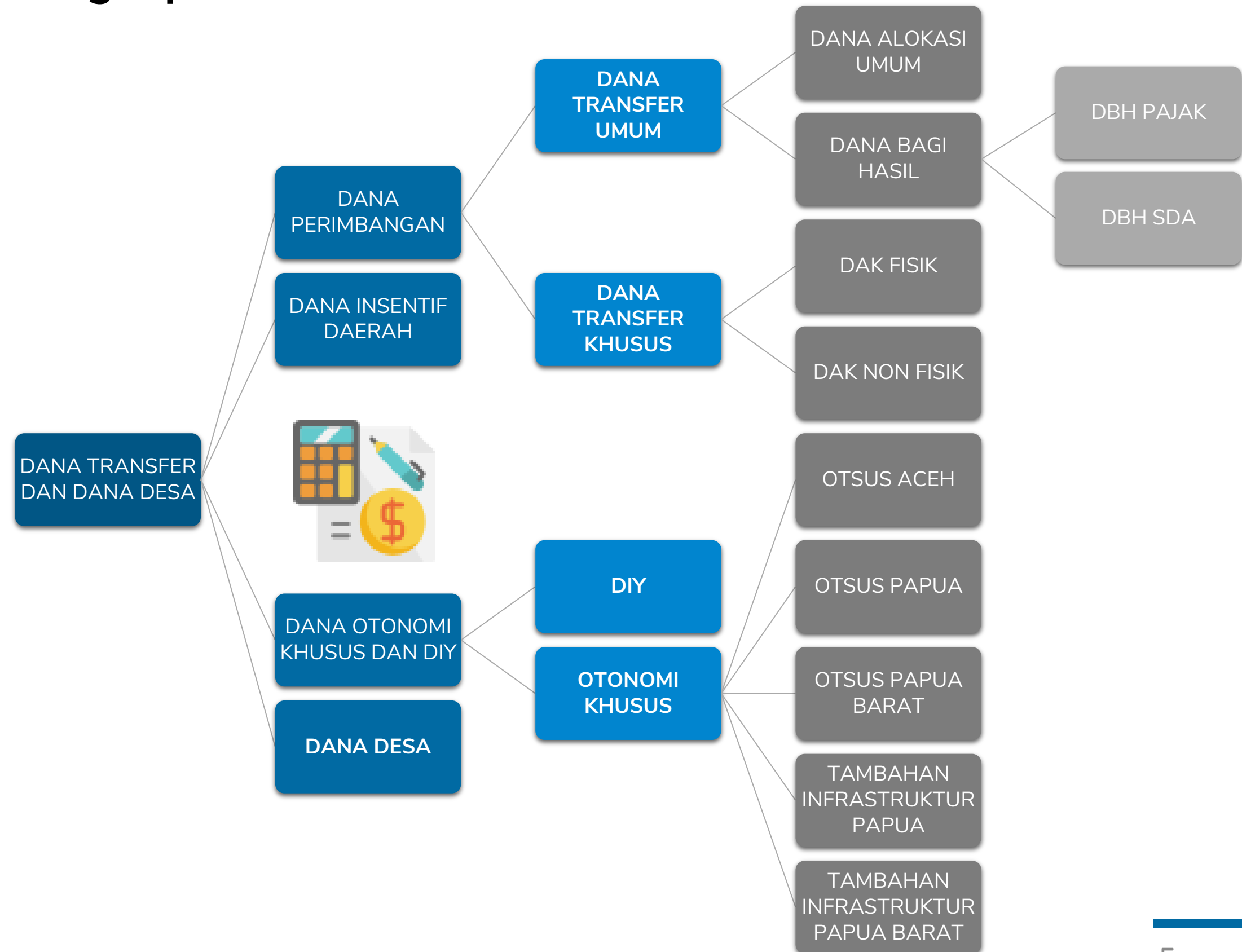
### Swasta

- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA)



### PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri)

## Lingkup Pemerintah Daerah







# Memperkuat Sinergi dengan Daerah

PP 17 Tahun 2017

Berdasarkan RKP, Menteri PPN menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta keluaran (*output*) dan lokasi sampai dengan Kab/Kota



1. Mempersiapkan **pelaksanaan dan mensinergikan** dengan program-program pembangunan daerah
2. Melakukan **koordinasi** dengan K/L terkait rencana pelaksanaannya



# Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019

## Tema:

**Pemerataan Pembangunan  
Untuk Pertumbuhan  
Yang Berkualitas**

01

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

02

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman

03

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

04

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air

05

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu





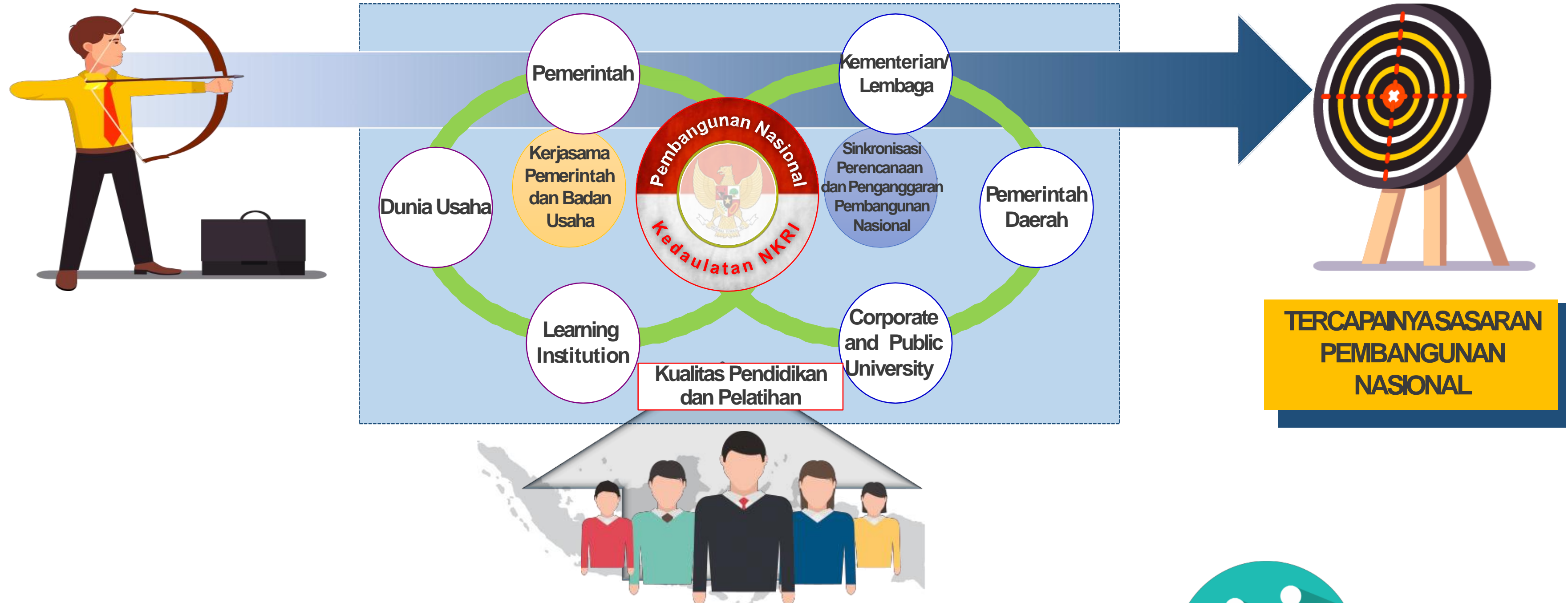
# 2

## Isu Strategis Pengembangan SDM Aparatur





# Mengoptimalkan Kinerja Pemerintah dalam Rangka Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional

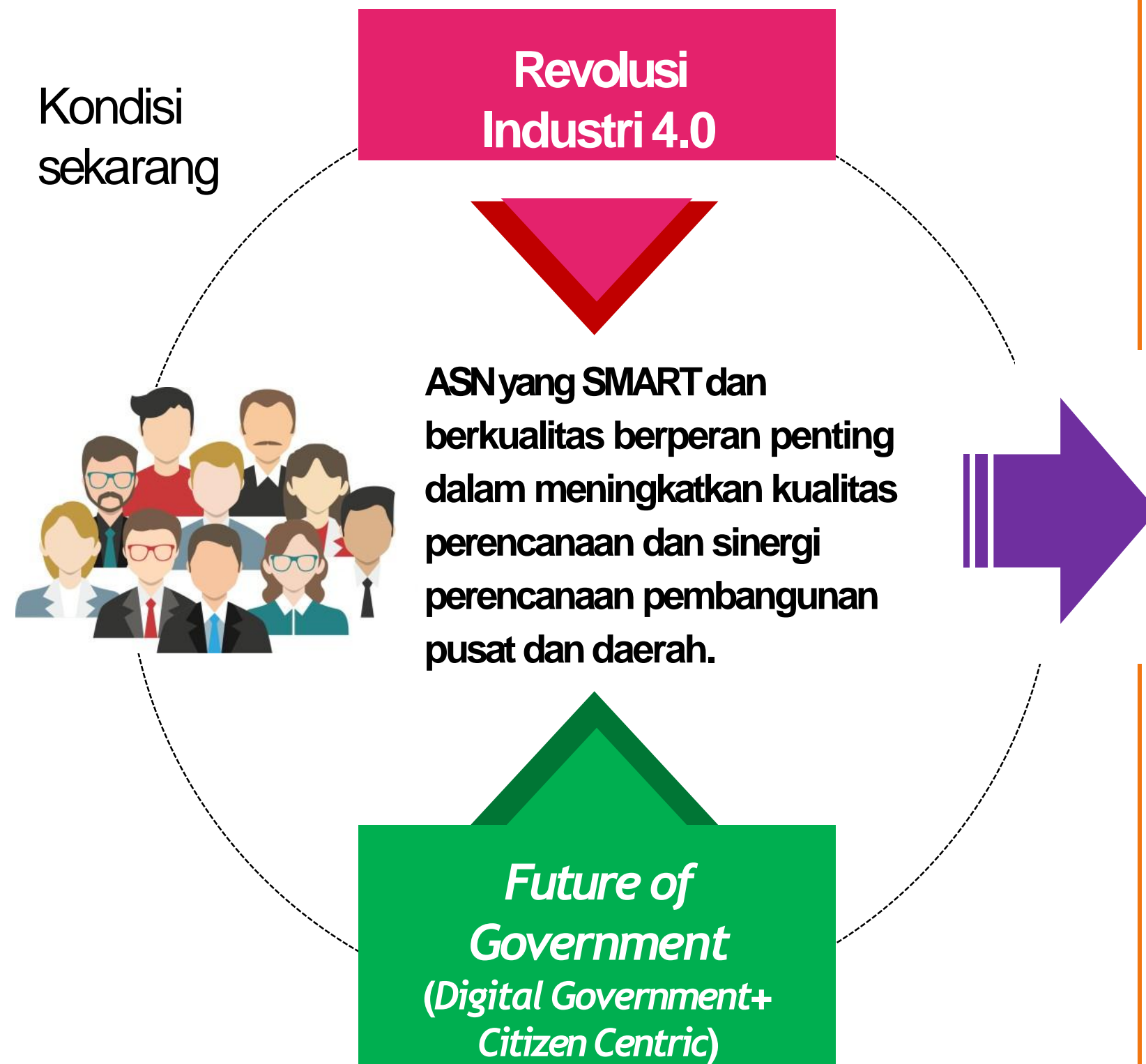


Perlunya Pengelolaan dan Pengembangan SDM yang Sesuai dengan  
Kebutuhan Pembangunan





# Visi Misi Pembangunan dan Tantangan



## IMPIAN INDONESIA 2085

- SDM Indonesia mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia
- Indonesia menjadi barometer perekonomian dunia

## VISI INDONESIA 2045

- Pembangunan SDM dan penguasaan iptek
- Pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Pemerataan pembangunan
- Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

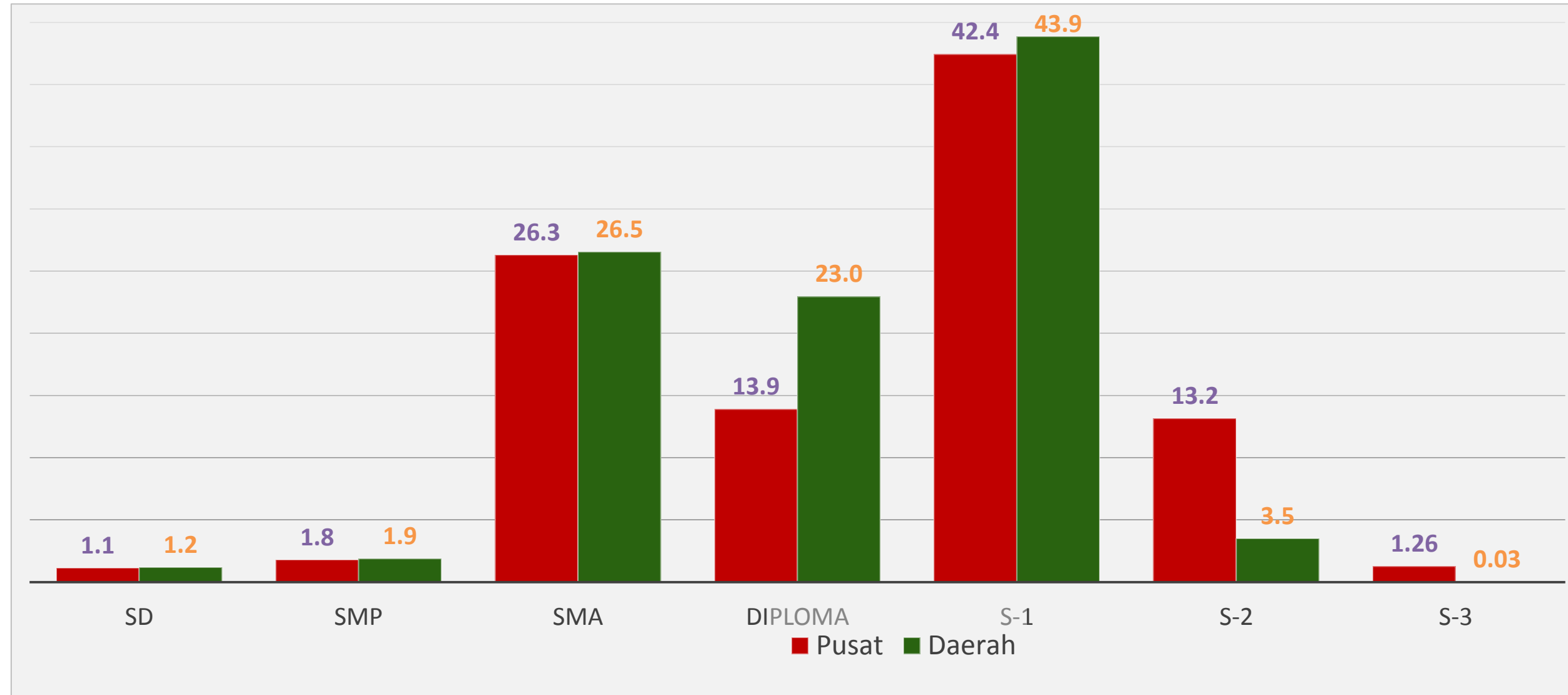
## RPJP2025

- Pembangunan SDM berkualitas
- Perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global
- Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek
- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju
- Reformasi hukum dan birokrasi





# Kondisi Pengembangan ASN Saat Ini: PNS Menurut Pendidikan (1/2)



Sumber : BKN, Desember 2017

- 30% PNS berpendidikan SMA atau lebih rendah





# Kondisi Pengembangan SDM ASN Saat Ini (2/2)



## Tenaga Spesialis Masih Terbatas

Hanya **10% ASN** dengan **jabatan JF Teknis** (di luar guru dan tenaga medis) dibandingkan dengan **38% JF Umum/Admin** dan **11% Struktural** (BKN, 2016)



## Ketidaksesuaian Antara Potensi Daerah dengan Kompetensi ASN Setempat

Hanya **0.06% ASN** di Kalimantan dengan **latar belakang perminyakan/pertambangan/geologi**; hanya **0.1% ASN** di Sulawesi berlatar belakang **perikanan** (Bappenas & Kemenpan RB, 2016)



## Program Pengembangan Kompetensi Belum Sesuai Kebutuhan Daerah

Program pengembangan kompetensi seperti diklat cenderung **membebani anggaran daerah** karena **tidak sesuai kebutuhan kompetensi di daerah** sehingga tidak bermanfaat signifikan bagi pengembangan potensi daerah



## Tumpang Tindih Pengembangan Kompetensi

Terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang disinyalir **tumpang tindih** substansinya sehingga membuat bingung daerah dan semakin membebani anggaran



# 3

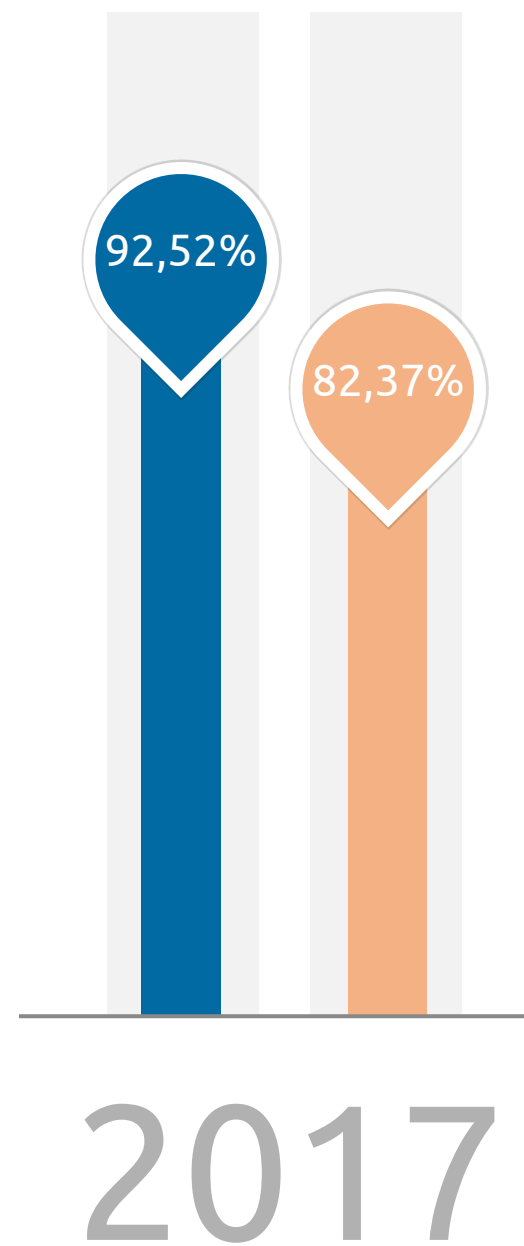
Proyek Prioritas  
Lingkup BPSDM  
Kemendagri dalam  
RKP 2019





# Output Prioritas BPSDM Kemendagri T.A. 2019; serta Capaian Kinerja dan Anggaran Satu Tahun Terakhir

■ Capaian Kinerja ■ Capaian Serapan Anggaran



Output Prioritas	Target	Satuan	Pagu (juta)
Orientasi DPRD hasil Pemilu Legislatif 2019 dilingkup Kantor Pusat	15	Angkatan	2.250
Angkatan pengembangan kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat	16	Angkatan	1.222
Orientasi DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 di lingkup Regional	12	Angkatan	1.800
Angkatan Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional	16	Angkatan	1.222



# Saran dan Rekomendasi



## Kebutuhan Daerah

Pengembangan kompetensi SDM Aparatur di daerah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi di daerah



## Potensi Unggulan

Perlu dipertimbangkan prioritas untuk menyusun materi diklat yang sesuai dengan pengembangan potensi unggulan daerah



## Kerja Sama Antarunit

Bekerja sama dengan UKE 1 lainnya di Kemendagri untuk penyusunan dan penyempurnaan materi



## Training Needs Analysis

Mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan untuk menyusun Training Need Analysis (identifikasi kebutuhan diklat) dalam menentukan prioritas kebutuhan diklat



## Inovasi

Senantiasa melakukan inovasi dalam delivery method dan materi program pendidikan dan pelatihan



## Koordinasi Lintas K/L/D

Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L pusat terkait (e.g. LAN, Kemenpanrb) dan Pemda dalam penyusunan materi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM aparatur daerah agar tidak terjadi tumpang tindih

# 1

## Arahan Umum Rancangan BS RPJMN 2020-2024



# Arahan RPJPN 2005-2025 Untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV)

Visi Pembangunan 2005-2025  
**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,  
ADIL DAN MAKMUR**

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:



# MODAL DASAR

---



**Indonesia Negara  
Kepulauan yang  
Strategis**



**Kekayaan Alam dan  
Keanekaragaman  
Hayati**



**Potensi Penduduk  
dengan Budaya  
yang Beragam**

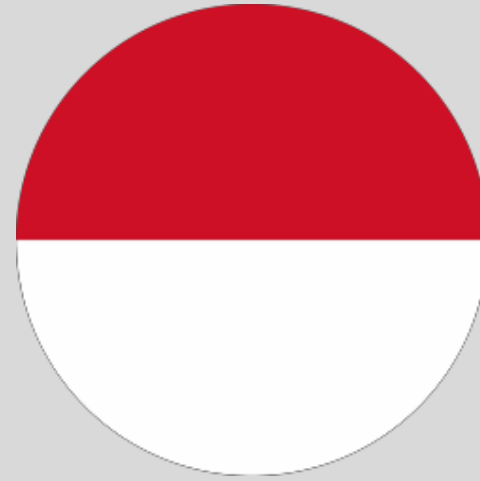


**Perkembangan Politik  
dan Demokrasi yang  
Matang dan Kondusif**



# VISI DAN MISI RPJPN 2020-2025 (1/2)

## VISI INDONESIA 2025



## INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR



### MANDIRI

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.



### MAJU

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.



### ADIL

Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.



### MAKMUR

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

## “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”



### Berpenghasilan Menengah-Tinggi

- Transformasi struktural berjalan.
- Produktivitas tenaga kerja meningkat.
- Iklim investasi kondusif.
- GNI per kapita USD3.896 –USD 12.055.



### Sejahtera

- Kualitas hidup meningkat.
- Perilaku disiplin dan beradab.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Indeks kebahagiaan meningkat.



### Adil

- Ketimpangan menurun.
- Redistribusi berjalan baik.



### Berkesinambungan

- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*).
- Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.



INDONESIA  
2045

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur

2020-2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



PEMBANGUNAN  
MANUSIA

- 1 Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



PEMBANGUNAN  
EKONOMI

- 1 Pangan
- 2 Energi
- 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
- 4 Industri Manufaktur
- 5 Kelautan dan Kemaritiman



PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN

- 1 Sentra-Sentra Pertumbuhan
- 2 Komoditas Unggulan Daerah
- 3 Pertumbuhan Perkotaan



PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR

- 1 Transportasi
- 2 Telekomunikasi
- 3 Sumber Daya Air
- 4 Perumahan dan Pemukiman



PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM,  
PERTAHANAN & KEAMANAN

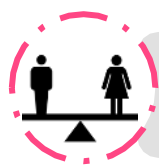
- 1 Hukum dan Regulasi
- 2 Pertahanan dan Keamanan
- 3 Politik

Development Constraints :

Kondisi Investasi

Kondisi SDA

PENGARUSUTAMAAN



Kesetaraan  
Gender



Tata Kelola  
(Governance)



Kerentanan  
Bencana



Perubahan  
Iklim



Modal Sosial  
dan Budaya

Kaidah Pembangunan :

Membangun Kemandirian

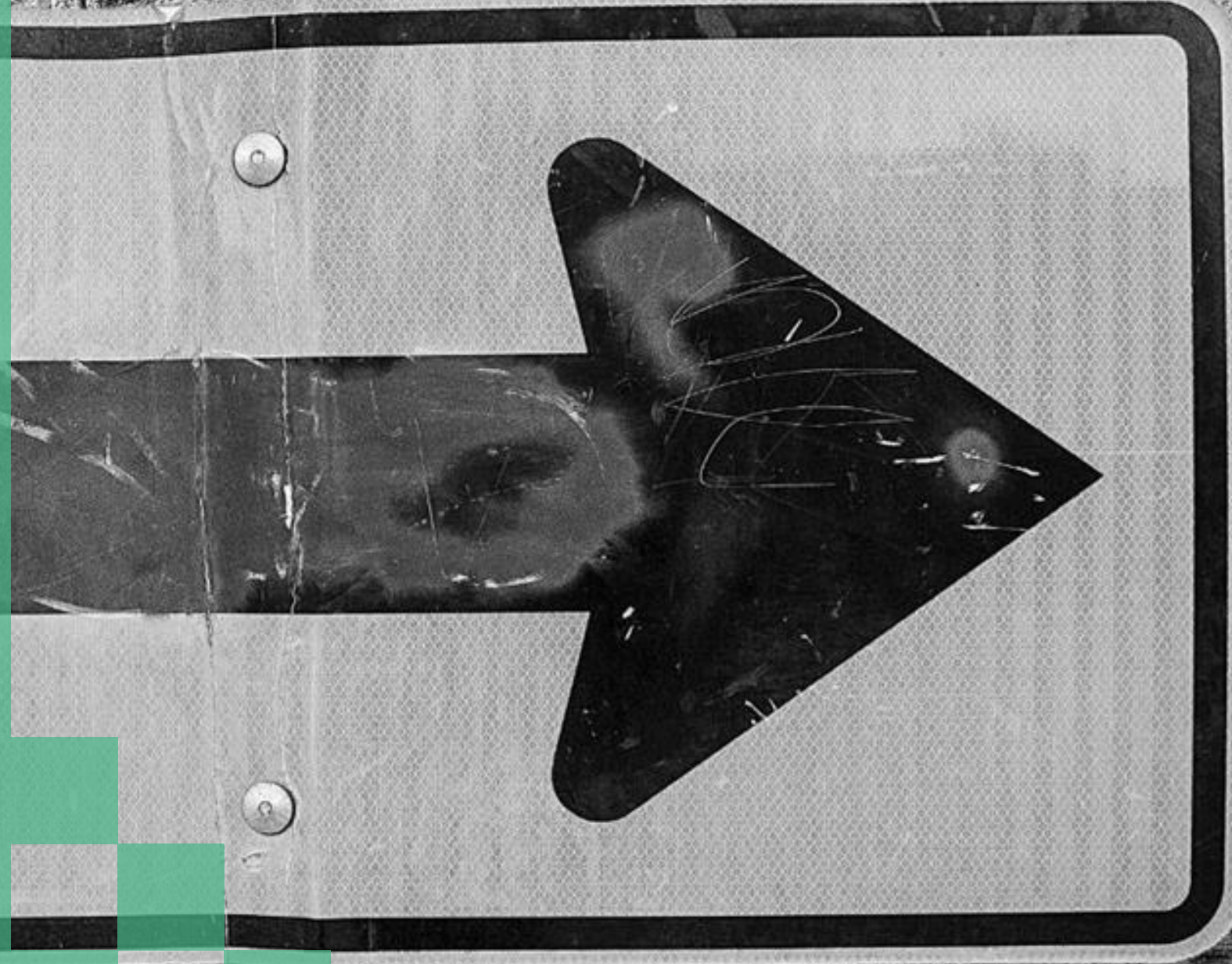
Menjamin Keadilan

Menjaga Keberlanjutan



# 2

## Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah





## PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH



- Kemiskinan di KTI (18,01%)\*, KBI (10,33%)\*, perdesaan (13.47%)\* dan perkotaan (7,20%)\* yang tinggi
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) - Perkotaan (0,4)
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

## PENGELOLAAN URBANISASI



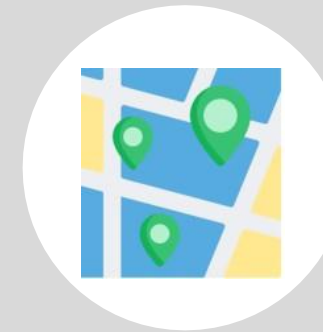
- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB)

## PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH



- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang

## PEMANFAATAN RUANG



- Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018)
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa)
- Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan, dsb)

## PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYASAING DAERAH



- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%\*, air minum 72%\*, sanitasi layak 67,5%\*, dsb)
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
- Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi

## ISU STRATEGIS



**Pembangunan Antar Wilayah  
Masih Timpang**



**Pusat Pertumbuhan Wilayah  
Masih Belum Optimal**



**Pelayanan Dasar Belum Optimal**



**Daya Saing Daerah Relatif  
Masih Rendah**



**Pemanfaatan Ruang dan  
Urbanisasi Kurang Terkendali**

## ARAH KEBIJAKAN



1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.



3. Peningkatan konektivitas antar-wilayah
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)



5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah



8. Peningkatan kemudahan perizinan
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah



11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah





# Terima Kasih



Direktorat Otonomi Daerah  
Kementerian PPN/Bappenas